

MASALAH DAN TANTANGAN SUBAK DI BALI BERKENAAN DENGAN AGRIBISNIS

Dr. Ir.Gede Sedana, M.Sc.,M.M.A

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra

Abstrak

Pembangunan pertanian perlu dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis yang saling terkait, saling tergantung, saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usahatani, dan hilir serta sektor jasa dan penunjang. Keberhasilan pembangunan agribisnis sebagian besar tergantung pada faktor dan kebijakan yang berada di luar kewenangan Kementerian Pertanian, seperti kebijaksanaan pengembangan infrastruktur dan sarana publik yang menunjang pertanian, seperti irigasi, jalan pertanian, energi, komunikasi, air bersih, kebijaksanaan kelembagaan pelayanan informasi, teknologi, kredit, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia, kebijaksanaan kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi. Namun, pembangunan pertanian dan pedesaan yang dilaksanakan di Indonesia tampaknya belum memberikan hasil yang diharapkan khususnya yang berkenaan dengan para petani. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran masalah dan tantangan subak di masa mendatang berkenaan dengan agribisnis.

Pengembangan sistem subak untuk tetap berlanjut memerlukan adanya penyatuan (suatu payung) manajemen kelembagaan di tingkat departemen dan koordinasinya antar sub-sistem di tingkat lapangan, atau dikenal dengan istilah "manajemen satu atap", sehingga para petani secara mudah melaksanakan kegiatannya dan mudah mendapatkan kebutuhan sarana produksinya. Paradigma pembangunan "haruslah" bermuara pada pertanian (petani) yaitu pengembangan subak-subak yang lestari dan dinamis, sepanjang masih diakui bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian dan pertanian merupakan salah satu aset budaya Bali. Langkah-langkah diatas merupakan salah satu wujud dari kegiatan pemberdayaan subak, dimana kegiatan ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan komprehensif.

Kata Kunci : pembangunan pertanian, pembangunan pedesaan, subak

Abstract

Agricultural development should be done through agribusiness approach which has good interrelated, interdependency and inter-determinant among the upstream and downstream sectors including supporting subsystem. The success of agribusiness is mostly influenced by the factors and policies beyond the authority of Agriculture Ministry, such as infrastructure development supporting agriculture. For instance, the irrigation, farm road, energy, communication, water sanitation, information services, technology, credit, agricultural extension and human resources development, is including cooperative. However, agricultural and rural development in Indonesia has not brought about yet the good impact, particularly to farmers. This paper aimed at giving description of problems and challenges of subak in the relation to agribusiness.

Sustainable development for subak needs an integrated management (an umbrella) at the ministries level, coordination at the level of field in order that farmers might easily implement the activities and get agroinputs. The new paradigm must flow to agriculture (farmers), that is sustainable and dynamic subaks as an asset of Balinese culture. This is one of the subak empowerment efforts in which this must be done by employing participative and comprehensive approaches.

Keywords: Agriculture, rural, development, subak, sustainable

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian perlu dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis yang merupakan keseluruhan subsistem usaha yang saling terkait, saling tergantung, saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usahatani, dan hilir serta sektor jasa dan penunjang (Mubyarto, 1989, Soekartawi, 2004; Fatah, 2006; Simatupang, 2004). Keberhasilan pembangunan agribisnis sebagian besar tergantung pada faktor dan kebijakan yang berada di luar kewenangan Kementerian Pertanian, seperti kebijaksanaan makro ekonomi yang meliputi kebijaksanaan moneter, fiskal, prioritas pembangunan, penanganan inflasi dan ketenagakerjaan, kebijaksanaan pengembangan infrastruktur dan sarana publik yang menunjang pertanian, seperti irigasi, jalan pertanian, energi, komunikasi, air

bersih, kebijaksanaan kelembagaan pelayanan informasi, teknologi, kredit, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia, kebijaksanaan kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi, kelompok usaha dan asosiasi, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang sangat baik antar instansi terkait, dan bahkan diperlukan kesamaan pandangan tentang *agribusiness-led development*.

Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan yang dilaksanakan di Indonesia tampaknya belum memberikan hasil yang diharapkan khususnya yang berkenaan dengan para petani. Terdapat beberapa kekeliruan utama dalam pembangunan pertanian seperti masih mencerminkan kemarjinalan konsep mengenai kelembagaan local, lemahnya pelibatan partisipasi masyarakat (Syahyuti, 2007; Chambers, 1983, Fatah, 2006; Elizabeth, 2007).

Pada kasus di Bali, disebutkan juga bahwa pembangunan pertanian yang dilaksanakan selama ini kurang menekankan pada *local institution endowment* (berbasis pada kelembagaan lokal) yang telah ada (Elizabeth dan Iwan, 2009). Kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar di dalam pembangunan pertanian dan tidak dilakukan penguatan *social capital* masyarakat (Syahyuti, 2007). Kuswanto (1997) juga menyebutkan bahwa ketidakberdayaan dalam memfungsikan kelembagaan lokal seperti kelompok tani dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), termasuk subak akan mengakibatkan ketidakberhasilan pengembangan agribisnis di pedesaan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran masalah dan tantangan subak di masa mendatang berkenaan dengan agribisnis.

Sejak terdahulu, keberadaan subak tidak dapat dilepaskan dengan dimulainya sistem pertanian yang diterapkan masyarakat Bali yang didasarkan pada temuan alat-alat pertanian kuno seperti di Desa Sembiran, salah satu desa tertua di Bali, yang digunakan untuk menanam padi. Praktek bertani masyarakat Bali juga tertulis dalam Prasasti Sukawana pada tahun 882, yaitu terdapat kata '*huma*' yang berarti sawah Pengelolaan irigasi termuat dalam Prasasti Trunyan (891), dengan disebutkannya kata "*serdamu*" yang berarti kepala urusan air danau. Prasasti Bebetin (896) yang ditemukan di Buleleng dan Prasasti Batuan (1022) menyebutkan adanya istilah *undagi pengarung* yaitu ahli pembuat terowongan air. Dalam Prasasti Pandak Badung (1071) dan Klungkung (1072) ditemukan kata suwak yang berasal dari dua kata, "su" yang berarti baik dan "wak" untuk pengairan. Dengan demikian, suwak dapat diartikan sebagai sistem pengairan yang baik.

Eksistensi subak di Bali diawali dengan penebangan hutan pada saat kedatangan Maha Rsi Markandeya yang mengemban misi untuk menyebarkan agama Hindu. Dari Pulau Jawa, Rsi Markandeya tiba di sebuah daerah yang saat ini menjadi wilayah administratif Desa Taro sebagai awal mula dibangunnya sistem bertani. Para petani tersebut membentuk komunitas dengan pola interkasi dan norma sosial yang saat ini dikenal dengan awig-awig. Oleh karena itu, keberadaan subak tidak dapat dilepaskan dengan pengaruh agama Hindu. Filosofi yang dikenal pada subak dan Agama Hindu adalah Tri Hita Karana.

Hingga saat ini, faktor perekat anggota subak adalah air irigasi untuk mengairi lahan sawahnya dan pura-pura yang dimiliki oleh mereka termasuk dengan pura-pura yang berada di luar wilayahnya tetapi memiliki kaitan hidrologis, seperti Pura Ulun Danu. Dengan demikian, subak diartikan sebagai sistem irigasi merupakan organisasi petani pengelola air yang mendistribusikan dan mengalokasikan irigasi pada usahatani lahan basah yang memiliki

satu sumber air, memiliki satu atau lebih pura, memiliki hak otonomi untuk mengatur organisasinya sendiri serta memiliki berbagai aturan yang dibuat bersama dan diataati bersama oleh semua anggotanya (Sutawan, dkk. 1989). Terdapat beberapa fungsi subak, yaitu (i) mendistribusikan dan mengalokasikan air irigasi; (ii) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (iii) mobilisasi sumber daya; (iv) penanganan konflik yang dihadapi subak; dan (v) menyelenggarakan kegiatan ritual/keagamaan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor: 2/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah disebutkan bahwa subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio-agraris religius yang secara historis didirikan sejak dulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain persawahan dari suatu sumber di dalam suatu daerah.

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi subak-subak di Bali dalam menghadapi terpaan arus globalisasi dan pembangunan di berbagai sektor. Diantaranya adalah (a) Alih fungsi lahan sawah; (b) kuantitas dan kualitas air; (c) lemahnya struktur permodalan; (d) efisiensi operasi dan pemeliharaan jaringan; (e) profesionalisasi manajemen usahatani dan organisasi; (f) serangan hama dan penyakit; (g) fluktuasi harga; (h) keengganan generasi muda untuk bertani.

Seperti diketahui bahwa perkembangan pembangunan di berbagai sektor memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan lahan-lahan pertanian, seperti sawah-sawah. “Celaknya”, sawah-sawah yang digunakan untuk keperluan non-pertanian tersebut adalah masih produktif. Tentu saja, kondisi sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan subak-subak termasuk penyediaan pangan. Beberapa contoh pembangunan yang terlihat ikut memberikan kontribusi pada penyusutan tersebut, di antaranya adalah pembangunan jalan, kawasan industri, dan permukiman. Selain itu, kondisi ini terjadi juga karena pengenaan pajak tanah sawah yang tinggi dan menjadi beban berat bagi petani untuk menanggungnya. Alih fungsi lahan ini menyebabkan aspek “tri hita karena” (tiga faktor penyebab kegahagiaan sejati), yaitu hubungan antara manusia dengan alam, antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia akan semakin terganggu. Lebih lanjut diungkapkan bahwa kebudayaan Bali secara keseluruhan akan terganggu pula.

Keterbatasan air yang tersedia di tingkat sumber (sungai/bendung) merupakan salah satu masalah yang serius bagi petani dan subak. Pada musim kemarau misalnya, petani sangat merasakan adanya kekurangan air yang memberikan dampak pada pemanfaatan lahan dan pertumbuhan tanaman yang bahkan menimbulkan gagal panen. Kondisi ini diperparah oleh adanya peningkatan pemanfaatan air di tingkat sumber untuk keperluan non-pertanian yang dapat menimbulkan konflik. Begitu juga pada musim hujan, kuantitas air yang sangat melimpah saat banjir mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan bahkan merusak tanaman yang sedang tumbuh di atas lahan sawah tersebut.

Buruknya kualitas air irigasi sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang akan diusahakan oleh petani dalam upaya peningkatan produktivitasnya karena banyak mengandung polutan sebagai akibat dari saluran-saluran irigasi subak-subak yang terkadang menjadi satu dengan drainase dan melintasi permukiman. Pencemaran terjadi karena adanya pembuangan sampah, limbah ternak (ayam dan babi) dan limbah lainnya yang langsung dibuang ke saluran irigasi yang sekaligus merupakan drainase.

Petani-petani di Bali yang terhimpun dalam subak, sebagian besar memiliki masalah yang berkaitan dengan penguasaan modal usahatani, baik yang diperlukan untuk keperluan sarana produksi pertanian, ternak dan lain sebagainya dan diperparah lagi dengan kondisi petani yang memiliki status sebagai penyakap. Mengingat terbatasnya kemampuan finansial subak untuk mengelola jaringan irigasi apalagi akan diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah, maka kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi akan dirasakan semakin berat oleh subak karena membutuhkan dana yang besar. Pengelolaan organisasi dan manajemen subak-subak saat ini belumlah profesional, sehingga kurang mampu mengantisipasi berbagai program untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Keadaan ini terindikasi dari adanya buku-buku administrasi yang tidak lengkap (jumlah dan isinya), dan perencanaan-perencanaan dalam pengelolaan usahatani dan irigasi yang kurang.

Dalam berproduksi sampai dengan pasca-panen, para petani juga selalu "dihantui" oleh adanya serangan hama dan penyakit. Mereka selalu merasa adanya ancaman terhadap kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat serangan hama dan penyakit. Padahal, mereka sudah melakukan upaya-upaya preventif dan penanggulannya. Para petani sering dihadapkan dengan tingkat harga yang tidak menentu karena berbagai faktor yang sangat sulit diduga, sehingga mereka sering memperoleh harga yang dirasakan tidak layak, khususnya harga gabah. Pada periode tertentu, di pasaran terjadi penawaran terhadap gabah yang melimpah sehingga harga gabah yang diterima lebih rendah dari harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian sebaliknya, saat terjadi kekurangan persediaan, para petani tidak mampu berproduksi sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat dan harga banyak ditentukan oleh penebas.

Sehubungan dengan tingkat penghasilan yang diperoleh dari usahatani yang kurang menguntungkan, memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor pertanian. Kondisi ini sangat mempengaruhi keberadaan petani yang ada saat ini, karena mereka tergolong relatif tua yang terkadang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan daya adopsi terhadap inovasi. Terdapat kecendrungan bahwa berusaha di lahan sawah dipandang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan dengan bekerja di sektor industri dan jasa. Sehingga tidak mengherankan jika terlihat pemuda-pemuda di desa dari kalangan petani meninggalkan orang tuanya dan pergi memburu pekerjaan di kota daripada menggantikan orang tuanya sebagai petani.

Masalah-masalah tersebut di atas jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius dapat memberikan dampak yang kurang baik seperti hilangnya sistem subak (seperti di Kota Denpasar), produksi menurun. Selain itu, "sengatan-sengatan" dari pembangunan di luar sektor pertanian mengakibatkan subak-subak hanya masih bisa bernafas yang tersengal-sengal. Oleh karena itu, diperlukan adanya berbagai upaya penanganan terhadap subak guna menjamin keberlanjutannya dan memberikan kesejahteraan bagi petani.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menyiapkan diri untuk menghadapi masalah tantangan di masa ke depan, khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan dan membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan mengajegkan subak-subak, maka diperlukan adanya langkah antisipatif bagi subak-subak yaitu dari sisi internal dan eksternal, yang

mana kedua faktor ini dapat disinergikan guna menghasilkan output yang optimal (sedana dalam Pitana dan Setiawan, 2005).

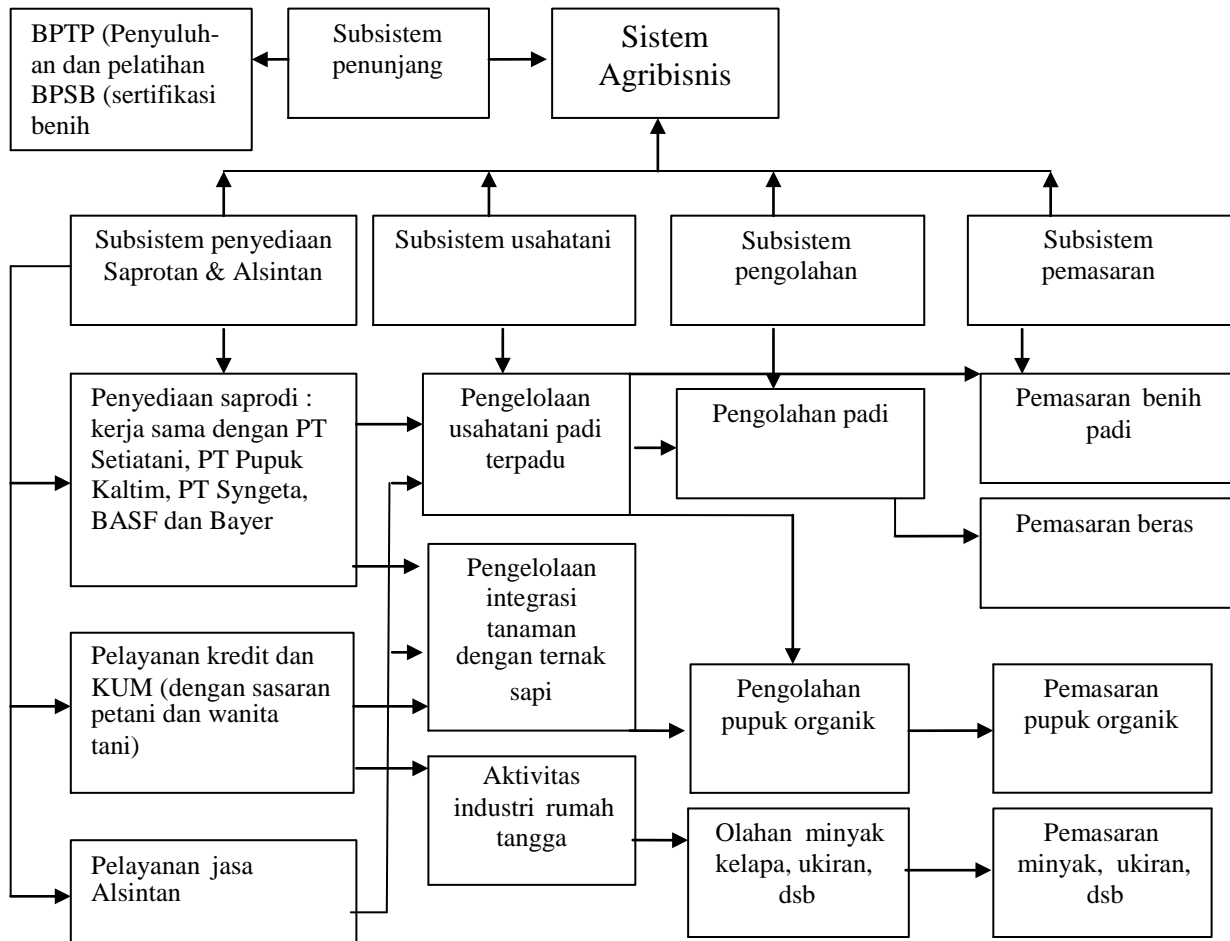
Sisi Internal

Beberapa upaya yang diperlukan untuk pengembangan subak berorientasi agribisnis berkelanjutan adalah: usahatani yang kompak, pemupukan modal, pembentukan unit usaha, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/petani.

Usahatani yang kompak adalah penyelenggaraan pengelolaan usahatani yang teratur dari aspek teknis dan non teknis. Dari aspek teknis, petani yang tergabung dalam satu subak dapat mengatur pola tanam dan jadwal tanam serta jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kondisi ini perlu dilakukan mengingat ketersediaan air irigasi yang terbatas dan guna menjaga lingkungan terhadap serangan hama dan penyakit, mengatasi fluktuasi harga serta kompetisi pemanfaatan air. Selain itu, kekompakan tercermin dari adanya suatu pengambilan keputusan secara bersama-sama mengenai apa yang harus dilakukan oleh petani dalam satu subak. Dengan demikian, terlihat disini bahwa yang terpenting adalah adanya “konsolidasi” manusia (petani) dalam pengambilan keputusan.

Konsolidasi yang dilakukan juga diharapkan mampu meningkatkan pemupukan modal secara internal, yaitu bersumber dari anggota yang dipungut secara proporsional apakah didasarkan pada “porsi” air yang diterimanya (tektek atau depuk atau istilah lainnya) atau didasarkan pada luas lahan sawah yang dikuasai.

Guna mendukung kegiatan ekonomis dan peningkatan pendapatan petani, maka disarankan kepada para petani yang tergabung dalam satu subak/subak-gede untuk dapat mengadakan kegiatan bisnis. Kegiatan yang dimaksud adalah membuat unit usaha penyediaan sarana produksi, pengelolaan alat-alat pertanian dan sebagai pemasar produk-produk yang dihasilkan. Tentunya pengelolaan ini harus dilakukan secara professional dengan tenaga profesional, misalnya sebagai manajer. Hal ini berkaitan juga dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan yang tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan mengenai 3 (tiga) aspek utama, yaitu organisasi dan manajemen, teknis (teknologi pertanian dan keirigasian), dan ekonomis/finansial. Salah satu gambaran kegiatan agribisnis pada subak yang telah membentuk koperasi tani adalah pada Subak Guama. Kegiatan tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi anggota dan juga subak melalui berbagai kaitan usaha agribisnisnya (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Kegiatan agribisnis pada Subak Guama

Pada Gambar 1 terlihat bahwa terdapat berbagai unit usaha bisnis yang saling terkait antara satu subsistem dengan subsistem lainnya, seperti pengelolaan integrasi tanaman dengan ternak sapi memunculkan adanya usaha bisnis pengolahan dan pemasaran pupuk organik.

Sisi Eksternal

Keberlanjutan pengembangan subak berorientasi agribisnis memerlukan adanya upaya dari pihak luar juga yang meliputi: jaminan hak guna atas air, pengembalian kelembagaan sedahan agung, perkuatan modal, kredit, bantuan sarana dan prasarana, jaminan pasar, iklim yang kondusif, penyuluhan dan pelatihan, asuransi pertanian, rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan tanah.

Hak guna atas air sangat penting diberlakukan oleh pemerintah guna memberikan jaminan bagi subak-subak untuk memanfaatkan air, mengingat penggunaan air sudah semakin kompleks karena kebutuhannya semakin meningkat, khususnya untuk non-pertanian. Sering terjadi konflik kepentingan antara subak dengan lembaga non subak (pemerintah atau non-pemerintah) ketika terjadi penggunaan air yang sumbernya adalah sama. Subak-subak selalu berada posisi yang “tidak menguntungkan” dengan berbagai dalih sehingga subak-subak “harus mengalah”

dan yang terjadi sawah-sawah kekeringan. Sawah-sawah yang kekeringan mendorong terjadinya lahan-lahan tidur, lahan-lahan ngantuk dan alih fungsi dari pertanian ke non-pertanian. Oleh karena itu, diperlukan adanya law enforcement terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air (UU RI No.7/2004) yang masih mengakui keberadaan subak.

Guna mengembalikan spirit pengelolaan sistem subak, perlu dikembalikan adanya fungsi dari kelembagaan Sedahan Agung seperti yang tertuang dalam PERDA Nomor 2 tahun 1972 tentang Irigasi. Sedahan Agung terdahulu menjadi “orang tua” seluruh subak-subak yang berada di setiap kabupaten dan kota.

Perkuatan modal adalah pemupukan dari dalam (internal) subak itu sendiri dan juga memerlukan tambahan modal yang diperoleh pihak luar, seperti bank. Untuk keperluan ini, maka pemerintah sudah seyogyanya memberikan fasilitas kredit yang mudah dan murah bagi petani sehingga mereka “terangsang” dan “termotivasi” untuk melaksanakan kegiatan usahatani. Perlu dibuatkan suatu skema kredit yang tidak memberatkan bagi petani dan tidak terlalu merugikan pemerintah. Kondisi yang demikian ini sejalan dengan yang juga menyebutkan bahwa kredit pertanian merupakan salah satu faktor penunjang di dalam pembangunan pertanian.

Kesulitan permodalan yang dialami oleh sebagian besar anggota subak untuk menyelenggarakan usahatani dapat diatasi dengan pengembangan beberapa kegiatan oleh pemerintah, di antaranya adalah (a) pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan; (b) pengembangan lembaga pembiayaan agribisnis; (c) pegadaian gabah, seperti yang dilakukan melalui percontohan di Indramayu; dan (d) pengembangan kredit ketahanan pangan.

Lebih lanjut disebutkan bahwa petani (seperti petani anggota subak) dapat diberikan bantuan sarana produksi melalui proyek-proyek pertanian dengan sistem atau pola bergulir, yang mana petani penerima bantuan diwajibkan mengemablikan dalam proporsi tertentu untuk diberikan kepada petani lainnya melalui kelompoknya. Dengan demikian, diharapkan secara perlahan akan terbentuk akumulasi modal yang cukup di kalangan petani yang selanjutnya membantu pengembangan kegiatan ekonomis kelompok dan bahkan ekonomi di perdesaan.

Saat ini pemerintah memberikan grant setiap tahun kepada seluruh subak selain subak-abian dan desa pakeraman. Kondisi ini merupakan bagian dari upaya berbagai kalangan untuk pemberdayaan subak tersebut. Kebijakan lain dari pemerintah adalah adanya subsidi pajak bagi petani anggota subak guna meringankan beban ekonomis yang dihadapi oleh para petani. Penguatan Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian ini dapat mengurangi beban Desa Pekraman yang selama ini sebagai pilar penyangga Adat, Budaya dan Agama Hindu Bali. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2013, Tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Hibah kepada Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian, pola pemberian bantuannya mengalami perubahan yakni bagi desa pekraman yang berada diwilayah Desa melalui pola BKK sedangkan pola Bantuan Hibah untuk Desa Pekraman di wilayah kelurahan.

Pada tahun ini bantuan mengalami peningkatan yaitu untuk desa pekraman yang sebelumnya sebesar 55 Juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Untuk subak dan subak abian sebelumnya 20 Juta rupiah menjadi 30 Juta rupiah. Bantuan tersebut diperuntukan bagi 1.482 Desa Pekraman dan 2.707 Subak dan Subak Abian.

Tersedianya pasar merupakan salah satu syarat mutlak di dalam pembangunan pertanian. Pasar yang dimaksud adalah tersedianya sejumlah produk-produk pertanian pada saat yang tepat di lokasi tertentu guna

memenuhi permintaan konsumen termasuk pedagang perantara. Mengingat harga produk-produk pertanian sangat fluktuatif, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih rinci kepada petani mengenai pasar baik dari aspek jenis produk, kualitas dan jumlahnya serta kemungkinan tingkat harga. Informasi ini akan sangat berguna bagi petani khususnya di dalam menentukan pilihan jenis tanaman yang akan diusahakan.

Selain adanya subsidi yang telah diberikan pemerintah melalui kredit-kredit yang telah ada sebelumnya (pada fase pra-produksi dan produksi), maka satu hal yang lebih penting artinya bagi petani adalah adanya subsidi pada output pertanian itu sendiri, khususnya tanaman pangan (gabah). Misalnya, pemerintah melalui badan yang telah dibentuk diwajibkan untuk membeli gabah petani yang memiliki mutu standar tertentu dengan harga yang layak. Selanjutnya, harga beras yang diberlakukan di pasaran masih tetap seperti yang ada sekarang ini. Kondisi ini perlu dilakukan karena para petani tidak mengkonsumsi gabah melainkan beras. Oleh karena itu dengan adanya harga gabah yang relatif tinggi maka akan mampu mendongkrak pendapatan petani yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraannya serta daya belinya. Artinya bukan harga beras yang tinggi, melainkan harga gabah yang tinggi. Oleh karena itu, mereka akan semakin “bernafsu” untuk mengelola usahatani di lahan sawah karena akan memperoleh penghasilan yang tinggi. Artinya, petani anggota subak tidak akan menjual lahan sawahnya.

Yang dimaksudkan dengan iklim yang kondusif adalah berbagai peraturan atau kebijaksanaan yang “memihak” kepada para petani, misalnya kebijakan harga dasar, penyediaan kredit usahatani, pajak, proteksi impor, dan perdagangan, serta yang lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya. Selain itu, keengganan untuk berusahatani yang terjadi pada beberapa daerah dapat dihindarkan dan akhirnya menciptakan bahwa “pertanian masih layak untuk dikelola dan menjadi kebanggaan.

Selain itu, kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh petani anggota subak adalah adanya “asuransi pertanian” yang memberikan jaminan bagi petani dalam berusahatani atau berproduksi. Pada kebijakan ini, perlu diformat adanya mekanisme yang menguntungkan bagi petani di dalam mengelola usahatani. Asuransi ini diperlukan mengingat adanya resiko yang sangat banyak yang dihadapi oleh petani, misalnya serangan hama dan penyakit, banjir, kekeringan dan lain sebagainya. Guna menghindari kerugian sebagai akibat gagal panen, maka asuransi inilah yang masih menopang penghasilan mereka. Oleh karena itu, asuransi pertanian ini akan memberikan jaminan mereka untuk tidak terjerumus dalam kemelaratan dan terjerat hutang akibat gagal panen.

Pengembangan teknologi (pertanian dan irigasi) juga sangat penting diintensifkan kepada petani, di mana teknologi tersebut harus memperhatikan *local knowledge* di masing-masing subak. Selain itu, dapat dilakukan dengan memperbaiki jaringan irigasi yang menyebabkan kehilangan air sebelum masuk ke lahan subak-subak atau sawah petani.

Sedangkan teknologi pertanian merupakan suatu cara atau teknik budidaya tanaman yang berkenaan dengan *water management*, seperti kebutuhan air (*water requirement*) setiap jenis tanaman pada lokasi dan periode tertentu. Selain itu, teknologi yang perlu dikembangkan pada subak-subak adalah pilihan jenis tanaman dan teknologi budidayanya yang memiliki nilai ekonomis tinggi (pasarnya jelas) dan efisien terhadap air irigasi. Sehingga diharapkan para petani dapat memanfaatkan air irigasi tidak melebihi kebutuhan airnya.

Guna menjamin adanya keberlanjutan terhadap pemeliharaan keindahan dan budaya subak, diperlukan adanya upaya fasilitasi oleh pihak pemerintah agar terjadi kemitraan yang saling menguntungkan antara subak-subak

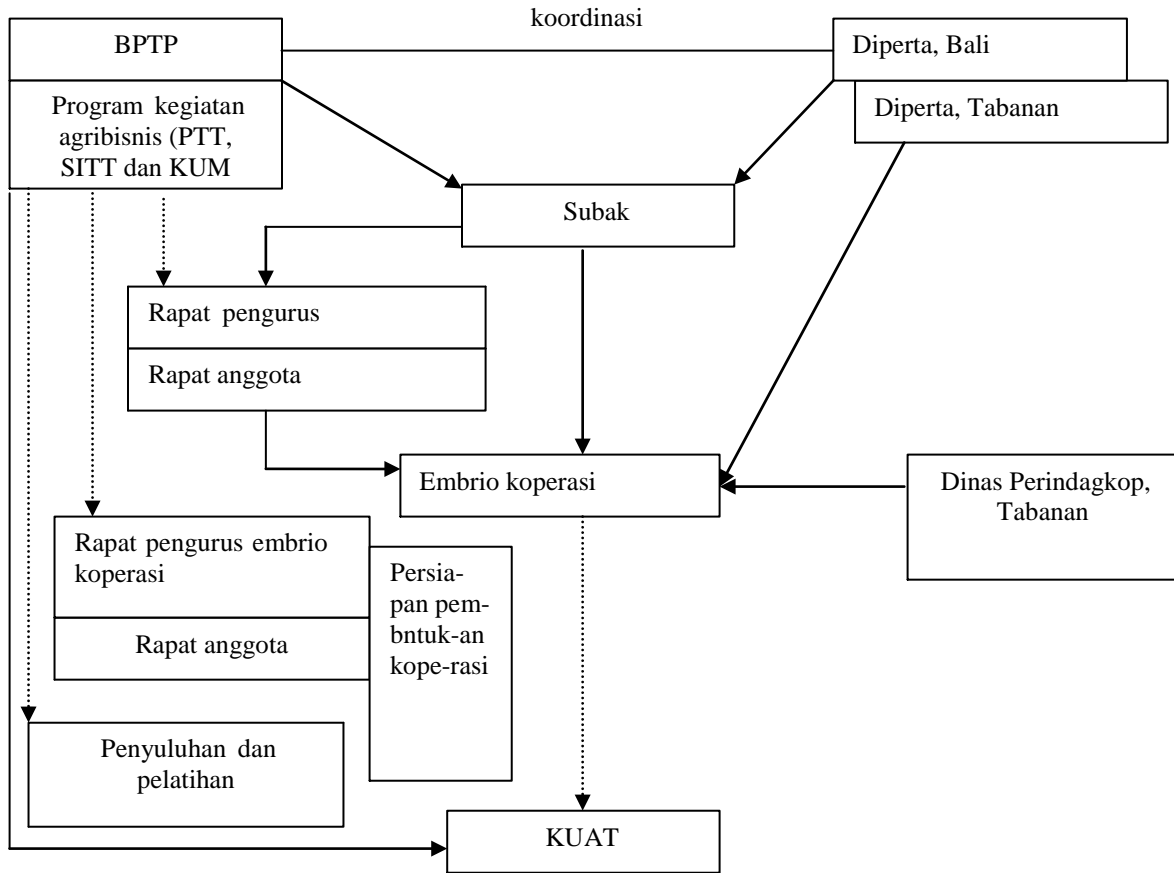
yang menjadi daerah tujuan wisata dengan pengelola pariwisata. Misalnya, diwujudkan adanya subak-subak binaan oleh pihak hotel, travel dan juga restoran yang mana wisatawannya membutuhkan sajian keindahan alam dan budaya pertanian atau persubakan. Sehingga, bukan subaklah yang semata-mata mendukung pengembangan pariwisata, tetapi pariwisataapun harus mendukung pengembangan subak. Jangan terjadi eksploitasi subak-subak untuk kepentingan pariwisata semata.

Dalam upaya untuk melestraikan sumberdaya alam (air dan tanah), maka upaya fisik dan non-fisik yang perlu dilakukan adalah mengadakan rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan tanah baik di daerah hulu maupun hilir. Konservasi yang dilakukan “haruslah” merupakan kegiatan yang didasarkan pada program yang komprehensif, yang melibatkan keseluruhan stakeholder, seperti institusi pemerintah dan non-pemerintah serta warga masyarakat (subak dan non-subak). Konservasi hutan, misalnya, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti geografisnya atau lokasi hutan (di dalam satu desa, kecamatan, kabupaten atau provinsi), status penguasaan tanah-tanah di dalam hutan, sifat hutan (produksi, lindung atau penyangga), dan sosio-kultural warga masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan tersebut. Dengan demikian kebersamaan antara warga subak-subak dengan non-subak dapat menjamin air irigasi yang dibutuhkan oleh subak.

Pendekatan dalam Pengembangan Agribisnis Subak

Kegiatan ekonomis merupakan suatu embrio bagi subak-subak untuk dapat meningkatkan usahanya dalam skala yang lebih besar. Belajar dari kasus Subak Guama, BPTP Bali menjadikan subak tersebut sebagai pilot proyek dalam pengembangan agribisnis terpadu melalui subak, yaitu dengan menginisiasi pembentukan Kegiatan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama. Dalam upaya untuk menjamin keberlanjutan pengembangan agribisnis berbasis subak, dilakukan kegiatan pemberdayaan sejak awal secara intensif dan partisipatif.

Dalam pembentukan koperasi, BPTP memfasilitasi pertemuan untuk membahas kesepakatan-kesepakatan mengenai kontribusi koperasi kepada subak dan simpanan wajib serta simpanan pokok dari anggota dan aturan-aturan lainnya. Pada pertemuan tersebut dilibatkan pula kepala desa dan PPL setempat termasuk Dinas Koperasi kabupaten. Koperasi yang terbentuk ini juga difasilitasi dan didorong untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti bank lokal, PT Pertani, PT PUSRI dan PT Pupuk Kaltim dalam rangka pengembangan jaringan kerjanya. Secara skematis, proses pengembangan agribisnis di Subak Guama dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses pengembangan agribisnis pada Subak Guama

3. PENUTUP

Pengembangan sistem subak untuk tetap berlanjut memerlukan adanya penyatuan (suatu payung) manajemen kelembagaan di tingkat departemen dan koordinasinya antar sub-sistem di tingkat lapangan, atau dikenal dengan istilah “manajemen satu atap”, sehingga para petani secara mudah melaksanakan kegiatannya dan mudah mendapatkan kebutuhan sarana produksinya. Paradigma pembangunan “haruslah” bermuara pada pertanian (petani) yaitu pengembangan subak-subak yang lestari dan dinamis, sepanjang masih diakui bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian dan pertanian merupakan salah satu aset budaya Bali.

Langkah-langkah diatas merupakan salah satu wujud dari kegiatan pemberdayaan subak, dimana kegiatan ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan komprehensif. Dengan semakin berdayanya subak, diharapkan para petani anggotanya menjadi semakin loyal terhadap profesinya, bangga dan merasa lebih “bergengsi” dengan profesinya, bangga dan merasa lebih “bergengsi” dengan profesinya, bersukaria dalam menerima hasil usahatannya, mandiri dalam pengambilan keputusan dan memiliki wawasan ekonomis/agribisnis, selanjutnya pertanian tidak ditinggalkan. Pengembangan subak berorientasi agribisnis menjadi salah satu cara dalam pelestariannya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. 1983. *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Elizabeth, R. 2007. Partisipasi sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Integrasi Jagung dan Ternak. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(8\)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(8)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak(1).pdf)
- Elizabeth, R. dan Iwan S.A. 2009. Sistem Kelembagaan Komunitas Petani Sayuran di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/MKP_B6.pdf
- Fatah, L. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Banjarbaru: Pustaka Banua.
- Hanggoro, H.T. 2012. Menyimak Subak. http://historia.co.id/artikel/kuno/1018/Majalah-Historia/Menyimak_Subak_dimuat_24_Mei_2012.
- Kuswanto. 1997. *Penyesuaian Kelembagaan P3A: Belajar dari Pengalaman Pengembangan Usaha Ekonomi P3A di Kabupaten Nganjuk*. Padang: PSI-UDLP, UNAND.
- Sedana, G. 2005. Masalah dan Tantangan Subak dalam Pembangunan Pertanian di Masa Mendatang. Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam Pitana dan Setiawan AP. editor. *Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi*. Yogyakarta: Andi
- Sutawan, N., M. Swara, W. Windia, dan IW Sudana. 1989. *Pilot Proyek Pengembangan Sistem Irigasi yang Menggabungkan Beberapa Empelan/Subak di Kabupaten Tabanan dan Buleleng*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Syahyuti (2007). "Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Bogor: *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007*